

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang saat ini memanfaatkan komputer baik hardware maupun software dalam mengolah data, melindungi informasi atau data, mengirim dan memperoleh informasi dengan aman. Teknologi informasi menjadi peran yang penting dalam segala aspek karena penerapan teknologi informasi telah banyak mendukung kegiatan operasional suatu lembaga. Suatu lembaga atau organisasi menerapkan teknologi informasi dalam segala kegiatannya karena: (1) adanya tugas dari manajemen yang makin meningkat, (2) adanya pengaruh globalisasi, (3) perlunya waktu tanggap (*respons time*) yang lebih cepat, (4) adanya persaingan bisnis yang makin ketat.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi dalam bekerja sehingga mempermudah dalam bekerja serta memunculkan adanya efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Teknologi informasi juga berperan penting dalam pemecahan suatu masalah. Salah satu penerapannya yaitu pada bidang pemerintahan.

Pada awalnya penerapan teknologi informasi pada bidang pemerintahan ini belum merambah ke berbagai wilayah, namun seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu mulai bermunculan terobosan-terobosan dalam bidang pemerintahan yang menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hampir semua bidang dalam pemerintahan telah

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi baik yang masih *stand alone* maupun sudah berbasis jaringan.

Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan adalah penerapan *e-government* di mana dalam implementasinya pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dengan menggunakan jaringan internet maupun aplikasi pemerintahan yang berbasis jaringan. Hal ini dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, pemerintah dengan bisnis, dan kegiatan lainnya. Secara lebih menghusus lembaga pemerintah dalam menyiapkan visi dan misi penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dapat mengacu pada efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (E-Government 2008).

Penerapan *e-government* di Indonesia yang diamanatkan dalam Inpres No. 3 tahun 2003 yaitu tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik. Dalam implementasinya dibutuhkan adanya teknologi informasi beserta sumber daya manusia yang handal. Pemanfaatan *e-government* mampu meniadakan kesan pelayanan pemerintahan yang birokratis dan kaku, sehingga dapat tercapainya pelayanan yang fleksibel, efektif dan efisien serta lebih mengutamakan kepuasan pengguna. *E-government* akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bisa diakses kapan pun, dan dari manapun masyarakat berada. *E-government* juga memungkinkan masyarakat tidak bertatap muka secara langsung dengan petugas pemerintah sehingga pelayanan menjadi lebih efisien (E-Government 2008).

Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengambil langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang dimulai dengan pembangunan website resmi pemerintah (<https://banglikab.go.id/>). Infrastruktur dan layanan yang telah dibangun oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) sebagai *leading sector* pengembangan *e-government* di Kabupaten Bangli telah dimanfaatkan oleh SKPD/UPT untuk menghasilkan data yang terpusat.

Sebagai sebuah instansi pelayanan masyarakat yang memiliki tugas utama untuk membuat kebijakan dibidang teknologi informasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli dituntut untuk memenuhi amanat Inpres No. 3 tahun 2003, yaitu dengan menerapkan *e-government* khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara elektronik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana TIK sebagai implementasi *e-government* di lingkungan unit kerja Pemerintah Kabupaten Bangli.

Penyelenggaraan *e-government* pada Diskominfo Kabupaten Bangli membutuhkan kematangan rancangan teknologi informasi beserta sumber daya manusia yang kompeten. Tata kelola Teknologi Informasi yang baik dan benar dapat menambah keunggulan kompetitif dan nilai tambah bagi organisasi. Diskominfo Kabupaten Bangli telah mengoperasikan berbagai aplikasi *e-government* dalam menunjang kinerja kepegawaian, seperti: SIMPEG, Perijinan, LPSE dan Open Data.

Dalam penyusunan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem informasi eksisting. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui kondisi dari sistem informasi yang telah berjalan apakah berjalan sesuai dengan tujuan proses serta untuk menghasilkan rekomendasi lebih lanjut untuk perkembangan sistem informasi. Evaluasi sistem informasi dapat mengacu pada salah satu *framework* yang ada yaitu COBIT 5. *Framework* COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) merupakan salah satu *tools* yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi (TI). Dalam perbandingan beberapa *tools IT Governance framework*, seperti COBIT, ITIL, COSO, dan ISO 17799, COBIT merupakan *framework* kontrol IT yang memiliki cakupan bahasan paling komprehensif dari sisi analisa kebutuhan *framework* kontrol (Atastina, Firdaus, and Candra 2015).

COBIT memiliki sekumpulan *control objectives* yang sudah diakui secara internasional yang digunakan dalam melakukan analisis dan kontrol terhadap tata kelola TI, yang bertujuan untuk menjembatani adanya kesenjangan antara masalah teknis dan risiko yang mungkin terjadi serta kebutuhan kontrol dalam mengembangkan kebijakan yang jelas. COBIT 5 menyajikan tata kelola TI dan indikator kunci yang bertujuan dalam pengembangan proses serta membantu organisasi menciptakan nilai yang optimal dari teknologi informasi dengan menjaga keselarasan antara perolehan manfaat, optimalisasi risiko dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki (Information et al. 2013).

Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait efisiensi dan efektifitas dalam pengolahan *e-goverment*, ditandai dengan adanya optimalisasi sarana dan prasarana, sumber daya manusia sehingga menyebabkan adanya kesenjangan akses informasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengukuran ini dapat memberikan gambaran kondisi sebenarnya

terkait pengelolaan *e-government* pada bidang tata kelola pada Pemerintah Kabupaten Bangli, sehingga dari gambaran kondisi ini dapat diberikan penilaian terhadap kualitas TI instansi, dan kedepannya diharapkan instansi memiliki solusi yang digunakan meningkatkan kualitasnya.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Adapun identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku.
2. Penyelenggaraan *e-government* membutuhkan kematangan rancangan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten namun dalam pelaksanaannya pemberdayaan sumber daya manusia yang kompeten masih belum maksimal.
3. Adanya kesenjangan akses informasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Evaluasi tata kelola *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), LPSE dan website *e-government* Pemerintah Kabupaten Bangli dari segi sumber daya, infrastruktur dan keamanan informasi.
2. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan acuan COBIT 5 dengan memperhatikan domain sesuai dengan hasil analisis domain COBIT 5 dan tujuan perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil evaluasi kondisi terkini tata kelola *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli?
2. Bagaimana pemetaan domain proses COBIT 5 terhadap hasil evaluasi tata kelola *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli?
3. Bagaimana rekomendasi hasil analisis GAP dan *level existing* yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dengan target *capability level*?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil evaluasi kondisi terkini tata kelola *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli dari segi sarana prasarana dan sumber daya manusia.
2. Untuk mengetahui pemetaan domain proses COBIT 5 terhadap hasil evaluasi tata kelola *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Untuk mengetahui rekomendasi tentang hasil analisis GAP dan *level existing* yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dengan target *capability level*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan khususnya tentang penggunaan COBIT 5 serta menjadi salah satu referensi untuk penelitian-penelitian sejenis di waktu yang akan datang.

1.1.2 Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian mengenai analisis tata kelola *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli, maka diharapkan:

1. Diperoleh hasil evaluasi kondisi terkini tata kelola *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli dari segi sarana prasarana dan sumber daya manusia sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas, nilai, efektivitas dan efisiensi, serta dilakukannya penyederhanaan alur proses dari suatu organisasi melalui penerapan *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Dapat diketahui pemetaan domain proses COBIT 5 terhadap analisis tata kelola *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Dapat memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Bangli untuk mewujudkan pemerintahan yang efisiensi, efektivitas, serta penyediaan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu bagi jajaran pengambil keputusan.